KAJIAN ILMIAH IMPLEMENTASI PROGRAM GERTAK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

by Slamet Riyadi

Submission date: 12-May-2020 09:58PM (UTC+1000)
Submission ID: 1274699805
File name: Laporan_Hibah.pdf (2.83M)
Word count: 13536
Character count: 94031

LAPORAN AKHIR

KAJIAN ILMIAH
IMPLEMENTASI PROGRAM GERTAK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

Dibiayai oleh :

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Trenggalek sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Swakelola Kajian Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Nomor : 074/1737/PPK.KPK/406.026/2019 tanggal 8 Oktober 2019

Ketua Tim :
Dr. Slamet Riyadi, MP, MM
NIDN. 0001035803

Anggota 1 :
Dr. Ir. JFX. Susanto Soekiman, MM
NIDN. 0724075501

Anggota 2 :
Bambang Raditya Purnomo, MM
NIDN. 0012088101

UNIVERSITAS DR.SOETOMO SURABAYA
Desember 2019

LAPORAN AKHIR

KAJIAN ILMIAH
IMPLEMENTASI PROGRAM GERTAK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

GERTAK
GERAKAN TENGOK BAWAH MASALAH KEMISKINAN

Kerjasama:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Universitas Dr Soetomo Surabaya

Dan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG)
Kabupaten Trenggalek

TRENGGALEK

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Kajian Ilmiah Implementasi Program GERTAK sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Trenggalek
Kode / Nama Rumpun Ilmu	: 571 / Manajemen
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. Slamet Riyadi, MP, MM
b. NIDN	: 0001035803
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
e. Nomor HP	: 08123563825
f. E-mail	: slamet.riyadi@unitomo.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap dengan gelar	: Dr. Ir. JFX. Suanto Soekiman, MM
b. NIDN	: 0724075501
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap dengan gelar	: Bambang Raditya Purnomo, MM
b. NIDN	: 0012088101
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Lama Penelitian	: 4 Bulan
Biaya Penelitian Yang Diusulkan	: Rp 50.000.000,-

Menyetujui,
Dekan

Dr. Ir. JFX. Suanto Soekiman, MM
NPP. 02.01.1.385

Surabaya, 10 Desember 2019
Ketua Peneliti

Dr. Slamet Riyadi, MM
NPP. 89.01.1.050

Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian
Universitas Dr. Soetomo

Dr. Endah Kurnia Hartati, MP
NPP. 95.01.1.198

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya Laporan Akhir tentang **Kajian Implementasi Program GERTAK sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek** dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Soetomo Surabaya dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2019.

Laporan ini memberikan gambaran umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, metode/pendekatan sampai dengan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan **Kajian Implementasi Program GERTAK sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.**

Trenggalek, 6 Desember 2019
Ketua Peneliti

Dr. Slamet Riyadi, MP, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR GAMBAR 5
BAB I. PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 PERMASALAHAN 12
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 13
1.4 MANFAAT 14
1.5 SASARAN 14
BAB II. KAJIAN TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Definisi Kemiskinan 16
2.2 Penyebab Kemiskinan 18
2.3 Lingkaran Kemiskinan 20
2.4 Indikator Kemiskinan 23
2.5 Mengukur Kemiskinan 24
2.6 Kebijakan Publik 26
2.7 Implementasi Kebijakan Publik 28
2.8 Model Implementasi Kebijakan Publik 26
BAB III. METODOLOGI 33
3.1 Waktu dan Lokasi 33
3.2 Penentuan sampel wilayah 33
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 34
3.4 Analisis Data 34
3.5 Skema Penelitian 34
BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 36
4.1 Geografis dan Administratif Kabupaten Trenggalek 36
4.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Trenggalek 38
4.3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Trenggalek 41
4.4 Gambaran Umum Program GERTAK 42

BAB V. PEMBAHASAN 45
5.1 Kebijakan Program GERTAK 45
5.2 Input 47
5.3 Tim Pelaksanan Program GERTAK 48
5.4 POSKO GERTAK.....50
5.5 Implementasi Pelaksanaan Program GERTAK 51
5.6 Model Evaluasi CIPP 53
5.7 Analisa Manajemen Strategik 61
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 69
6.1 Kesimpulan.....69
6.2 Saran.....71
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kabupaten/kota di Trenggalek serta luas wilayah administratif masing-masing
Tabel 2. Total jumlah penduduk dan angka kemiskinan di Trenggalek
Tabel 3. Rincian dan jadwal penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus kemiskinan dari sisi pendapatan
Gambar 2. Siklus kemiskinan dari sisi tabungan
Gambar 3. Siklus kemiskinan dari sisi konsumsi
Gambar 4. Peta Kabupaten Trenggalek
Gambar 5. Skema penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Trenggalek. Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas-fasiltias pendidikan, kesehatan dan peluang-peluang ekonomi yang tersedia (Subianto, 2008).

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan pun sangat beragam teknik pengukuran dan indikatornya. Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat

miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarkat miskin.

Juga banyak aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni: anonimitas, independensi, maksudnya ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Sangat banyak dan beragamnya definisi, pengukuran dan indikator kemiskinan menjadikan pendataan masyarakat miskin pun menjadi semakin kompleks.

Badan Pusat Statistik melakukan pendataan kemiskinan dengan konsep Top-Down dan baru dilakukan pembaruan basis data terpadu setiap 3 tahun sekali. Hal ini menyebabkan bukan datanya yang salah tapi fenomena yang bergerak melampaui kecepatan updating data atau data bisa dikatakan out of date. Selain itu data angka kemiskinan berbasis survey yang sering dirilis belum berbasis BNBA (by name by address) yang akhirnya pemerintah hanya mampu melakukan sensus pendataan setiap tiga tahun sekali untuk mendapat data BNBA. Akan tetapi tidak hanya besar prosentase kemiskinan seperti yang disurvey melainkan 40% masyarakat berpenghasilan rendah yg dibagi menjadi 4 desil. Pemanfaatan data ini juga cukup ambigu dan belum digunakan secara tepat oleh pengambil kebijakan. Dalam data tersebut terdapat beberapa desil atau prosentase terendah dalam melihat rumah tangga miskin yaitu : a) Desil satu (1) dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 10 % terendah; b) Desil dua (2) dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 20 % terendah; c) Desil tiga (3)

dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 30 % terendah; 4) Desil empat (4) dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 40 % terendah.

Tabel 1. Tabel Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan

di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
1	Panggul	3,093	3,896	2,964	890	10,843
2	Dongko	3,959	3,653	1,773	303	9,688
3	Munjungan	1,951	2,347	2,036	629	6,963
4	Tugu	1,004	2,116	2,380	900	6,400
5	Gandusari	609	1,864	2,427	867	5,767
6	Pogalan	384	1,522	2,282	907	5,095
7	Kampak	1,427	1,788	1,324	388	4,927
8	Durenan	882	1,610	1,752	626	4,870
9	Bendungan	2,070	1,815	728	117	4,730
10	Karangan	588	1,484	1,645	682	4,399
11	Trenggalek	700	1,265	1,371	652	3,988
12	Suruh	1,125	1,467	979	276	3,847
13	Waulimo	780	1,236	1,229	463	3,708

Sumber : Basis Data Terpadu TNP2K

Dari data diatas bisa dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin paling banyak di Kabupaten Trenggalek ada di Kecamatan Panggul yaitu sebanyak 10.844 rumah tangga hal ini disebabkan Kecamatan Panggul merupakan kecamatan yang sangat jauh aksesnya dari pusat kota sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama yang miskin belum

tersentuh sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan jumlah rumah tangga miskin paling sedikit ada di Kecamatan Watulimo yaitu sebanyak 3.708 rumah tangga, dimana Kecamatan Watulimo merupakan kecamatan dengan pusat pariwisata seperti pantai, bakau, goa yang juga menunjang adanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar tempat pariwisata tersebut. Sedangkan jumla rumah tangga miskin desil ke 1 yang tertinggi adalah kecamatan Dongko dengan jumlah 3,959 rumah tangga. Jumlah rumah tangga miskin desil ke-2 yang tertinggi adalah Kecamatan Panggul yakni sejumlah 3.896 rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin desil ke-3 tertinggi juga masih di Kecamatan Panggul yakni sejumlah 2.965 rumah tangga. Dan yang terakhir untuk jumlah rumah tangga miskin desil ke-4 paling banyak ada di Kecamatan Pogalan yakni sebanyak 907 rumah tangga. Perbedaan-perbedaan angka kemiskinan dengan persentase 10%-40% tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah saat itu belum terkoordinasi dengan baik dalam memberikan bantuan-bantuan kemiskinan.

Dari pemaparan diatas persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dimensi atau faktor-faktor kemiskinan yang multidimensional. Menyebabkan penanggulangan dan pengentasan menjadi kompleks, seandainya sudah menyasar sesuai data tetapi tidak menyentuh semua faktor maka kemiskinan tidak bisa dikatakan terselesaikan. Sebagai contoh: orang miskin hanya diintervensi bedah rumah, tapi sanitasi dan air bersih tidak terpasang, kecukupan gizi tidak terpenuhi, pendidikan tidak mampu mengakses, maka percuma saja anggaran pemerintah sudah keluar akan tetapi tidak mampu secaura progresif mengurangi kemiskinan.

Belum lagi ketika dalam mengakses pelayanan, orang miskin harus dipaksa mendatangi banyak dinas, harus pontang panting ke dinas pendidikan, dinas sosial, RSUD, dinas kesehatan, dan lainnya. Maka perlu adanya Unit Pelayanan Terpadu untuk kemiskinan. Selain juga memastikan orang-orang yang mengharapkan bantuan adalah benar-benar miskin. Karena seperti di Trenggalek, karena banyaknya orang miskin yg belum terakomodir dalam basis data terpadu maka pemerintah menerbitkan SKTM, yang akhirnya menjadi sangat serampangan menyebabkan pemborosan. Terbukti subsidi kesehatan untuk pelayanan RS yang setelah gertak berkisar antara 3-4 Milyar dulu berkisar 11-an Milyar.

Dalam dimensi kemiskinan kita tidak hanya membicarakan tentang bagaimana menanggulangi kemiskinan akan tetapi juga pengentasan kemiskinan. Maka membina ekonomi rakyat menjadi penting. Pemerintah menyasar anak-anak muda dari keluarga miskin untuk dijadikan pengusaha baru, memberikan dana permodalan tanpa agunan dengan bagi hasil 2% per tahun melalu Bank Daerah, juga bantuan sarpras dan pelatihan difokuskan pada kelompok keluarga miskin, termasuk mereplikasi PKH hingga mencapai graduasi mandiri atau orang miskin yang menyatakan diri lepas dan sudah tidak miskin lagi.

Seiring berkembangnya era otonomi daerah, maka pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang ada. Hal ini dikarenakan pemerintah yang ada ditingkat daerah lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui bagaimana karakteristik serta potensi yang ada di daerah tersebut. Adapun salah satu Kabupaten/Kota yang melakukan upaya penanggulangan kemiskinan adalah Kabupaten Trenggalek dengan dibentuknya program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) diharapkan mampu menyelesaikan masalah- masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Untuk itu Gertak lahir dan menjadi program utama dari pemerintah Trenggalek. Yang membedakan dari program lainnya adalah bagaimana pemerintah menggeser paradigma penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dari sekedar "program" menjadi sebuah "gerakan". Sehingga proses deliberasi dan gotong-royong tercipta. Melalui platform 3 sedekah: a) sedekah informasi, b) sedekah partisipasi, c) sedekah rezeki.

Program GERTAK mempunyai 5 strategi implementasi yaitu, *pertama* Golden Standart dan klasifikasi kemiskinan. Pada tahap ini pemerintah akan memberikan standart atau membuat klasifikasi bagi masyarakat miskin yang dianggap berhak menerima bantuan. *Kedua* adalah mekanisme mutasi, dimana tahap ini data masyarakat miskin akan diupdate dalam 3 bulan sekali sehingga pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. *Ketiga* adalah Unit Unit pelayanan terpadu ini nanti diharapkan akan menjadi rujukan segala pelayanan bentuk kemiskinan. *Keempat* adalah Bina Ekonomi Rakyat, masyarakat yang masih produktif akan dibina dengan program berkelanjutan, unit usaha untuk masyarakat kurang mampu atau miskin. *Kelima* adalah Redifinisi dan Evaluasi, sehingga setelah proses berjalan BAPPEDALITBANG harus terus mengkoreksi dan berkoordinasi dengan TKPK yang lain. Apabila kelima tahap ini dilaksanakan dengan baik dan sinergi Pemerintah dengan beberapa elemen masyarakat terjalin dengan lancar maka cita-cita program GERTAK dalam mengentas atau mengatasi permasalahan kemiskinan akan terwujud.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Trenggalek selaku lembaga perwakilan pemerintah pusat di daerah memandang perlu dilakukan studi mendalam tentang implementasi Program GERTAK sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program-program ke depan.

Evaluasi Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas setiap program yang dilaksanakan. Output yang diharapkan dari kegiatan semacam ini, disamping tersedianya informasi-informasi penting yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem dari program-program yang sudah dilaksanakan, juga muncul rekomendasi-rekomendasi spesifik berbasis sumberdaya daerah. Studi-studi semacam ini diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

1.2 PERMASALAHAN

Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek masih tergolong tinggi, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Timur. Program GERTAK memang mampu mengurangi angka kemiskinan namun dirasa masih bisa lebih dimaksimalkan dalam mengurangi angka kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan.

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Trenggalek, 2010-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bln)	Jml. Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (000)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (poin)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2010	195.444	108,00	16,00		2,54	0,59
2011	214.312	101,20	14,90	-1,10	2,64	0,70
2012	228.681	96,61	14,16	-0,74	1,88	0,42
2013	243.665	92,42	13,50	-0,66	1,76	0,35
2014	250.666	90,04	13,10	-0,40	1,98	0,44
2015	260.133	92,17	13,39	0,29	2,18	0,59
2016	275.426	91,49	13,24	-0,15	1,74	0,37
2017	288.779	89,77	12,96	-0,28	1,71	0,40
2018	308.644	83,50	12,02	-0,94	1,85	0,42

Sumber : BPS KAbupaten Trenggalek, 2018

Oleh karenanya, kajian hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sangat diperlukan. Untuk lebih jelasnya, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisa manajemen strategi dalam perumusan Program GERTAK dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
b. Formulasi strategi implementasi Program GERTAK agar lebih optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
c. Mekanisme sinergitas antar UPTD dalam implementasi Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
d. Perubahan Paradigma implementasi Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dengan maksud tersebut maka tujuan penelitian adalah berikut:

1. Menganalisa strategi perumusan Program GERTAK dan formulasi impementasi Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Trenggalek.
2. Mengidentifikasi bentuk, jenis dan mekanisme intervensi pemerintah beserta mitra (kebijakan dan program) untuk penanggulangan kemiskinan di Trenggalek.
3. Mengetahui efektifitas (korelasi) program-program penanggulangan kemiskinan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

4. Memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaan program yang sudah berjalan maupun program baru untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di kantung-kantung kemiskinan.

1.4 MANFAAT

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta respon masyarakat miskin terhadap Program GERTAK.

Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan terutama BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Trenggalek.

1.5 SASARAN

1. Tersedianya informasi tentang analisa strategi perumusan Program GERTAK dan formulasi implementasi Program GERTAK.
2. Teridentifikasinya bentuk, jenis dan mekanisme intervensi pemerintah beserta mitra pemerintah dalam Program GERTAK.
3. Tersedianya informasi tentang korelasi antara Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
4. Teridentifikasinya informasi yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Trenggalek.

5. Tersusunnya daftar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maupun program-program baru di Kabupaten Trenggalek.

BAB II. KAJIAN TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kemiskinan

World Bank (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk kehilangan kesejahteraan (*depriviation of well being*) dari individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Pattinama (2009), kemiskinan merupakan suatu kondisi rendahnya akses individu/masyarakat terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Definisi yang lebih spesifik disampaikan oleh BPS (2016), dimana kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar baik itu kebutuhan makanan dan non-makanan. Kebutuhan makanan diartikan sebagai kebutuhan minimum kalori perorang perhari, yaitu 2.100 kilokalori (Suharto dkk, 2002). Sedangkan yang termasuk kebutuhan non-makanan adalah kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga diartikan dari aspek sosial oleh Sen dalam Bloom dan Canning (2001), sebagai bentuk kekurangan kebebasan substantif "*capability deprivation*" yaitu kesempatan dan rasa aman. Mengacu pada definisi kemiskinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi kehidupan yang sangat kompleks. Dalam laporan ini, definisi kemiskinan akan lebih banyak mengacu kepada definisi yang disampaikan oleh BPS karena variabel-variabel yang digunakan lebih terukur dan jelas.

Kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro (1997) dapat diklasifikasi ke dalam 4 macam, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, yaitu keadaan dimana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan minimum. Seseorang termasuk ke dalam golongan miskin

absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Definisi kemiskinan absolut seringkali digunakan dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah karena definisi dan pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau perkiraan dampak suatu proyek terhadap kemiskinan. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia untuk dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Bank Dunia menggunakan pendekatan ini karena memudahkan dalam menentukan kemana dana bantuan akan disalurkan dan kemajuan yang dicapai suatu negara dapat dianalisis.

2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya. Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.
3. Kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.
4. Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang

membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. Menurut Mardimin (1996), kemiskinan kultural terjadi karena budaya masyarakat sendiri yang sudah turun-temurun membuat mereka menjadi miskin.

2.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan menurut Munkner (2001) disebabkan oleh faktor-faktor dan dimensi-dimensi yang berbeda. Secara konseptual, penyebab kemiskinan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Chalid, 2006).

1. Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan faktor alam seperti sumberdaya yang langka dan akibat perkembangan teknologi yang rendah dan juga kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumberdaya alam yang tetap. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti ini pada umumnya tidak mempunyai kesenjangan yang terlalu tinggi (Medah. 2013).
2. Kemiskinan struktural atau kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan suatu sistem supra-struktural politik yang membentuk struktur-struktur sosial. Fenomena di lapang menunjukkan bahwa penduduk miskin tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Misalnya, kebijakan telah membuat sekelompok masyarakat mendominasi penguasaan sarana ekonomi, sementara kelompok masyarakat lainnya tidak memiliki kesempatan. Pada kategori ini, kesenjangan ekonomi masyarakat sangat tinggi antara yang miskin dan yang kaya.

3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul akibat tuntutan tradisi/adat yang membebani masyarakat seperti upacara perkawinan, kematian dan pesta adat lainnya, dan juga sikap mentalitas seperti lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke depan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia umumnya dapat dikategorikan ke dalam bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari supra-struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta dipinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya tingkat keswadayaan masyarakat.

Sumber lain mengklasifikasi penyebab kemiskinan menjadi 2 faktor, yakni: faktor manusia, dan faktor non-manusia.

a. Faktor oleh manusia, meliputi: sikap, pola pikir serta wawasan yang rendah, malas berpikir dan bekerja, kurang keterampilan, pola hidup yang cendrung konsumtif, sikap apatis/egois/pesimis, rendah diri, adanya jarak antara kaya dan miskin, belenggu adat dan kebiasaan, adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya), adanya perusakan lingkungan hidup, pendidikan rendah, populasi penduduk yang tinggi, pemborosan dan kurang menghargai waktu, kurang motivasi mengembangkan prestasi, kurang kerjasama, pengangguran dan sempitnya lapangan kerja, kesadaran politik dan hukum, serta tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam (SDA) setempat (Manurung dalam Bulletin YDS, 1993).

b. Faktor non-manusia, meliputi: faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit, keterisolasian desa, sarana perhubungan tidak ada, kurangnya fasilitas umum, langkanya modal, tidak stabilnya harga hasil bumi, industrialisasi sangat minim, belum terjagkau oleh media informasi, kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa, serta kepemilikan tanah yang kurang merata (Manurung dalam Bulletin YDS, 1993).

2.3 Lingkaran Kemiskinan

Kemiskinan suatu individu atau kelompok masyarakat dapat dikarenakan individu atau kelompok masyarakat tersebut berada dalam suatu siklus yang membawa pada kondisi miskin. Jika dianalisis terdapat tiga siklus kehidupan yang dapat membawa individu atau kelompok masyarakat pada kondisi miskin. Pertama, yaitu jika siklus dilihat dari sektor ekonomi yaitu tingkat pendapatan yang rendah. Seseorang yang miskin memiliki pendapatan rendah dan mengakibatkan si miskin memiliki daya beli yang rendah atas pendidikan dan informasi. Karenanya, si miskin hanya mendapatkan tingkat pengetahuan rendah dan berpengaruh pada tingkat produktifitas yang dihasilkannya juga rendah. Sebagai akibatnya, individu atau kelompok masyarakat tersebut menjadi tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai ada suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah tidak menjadi miskin kembali atau setidaknya memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun siklus ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut.

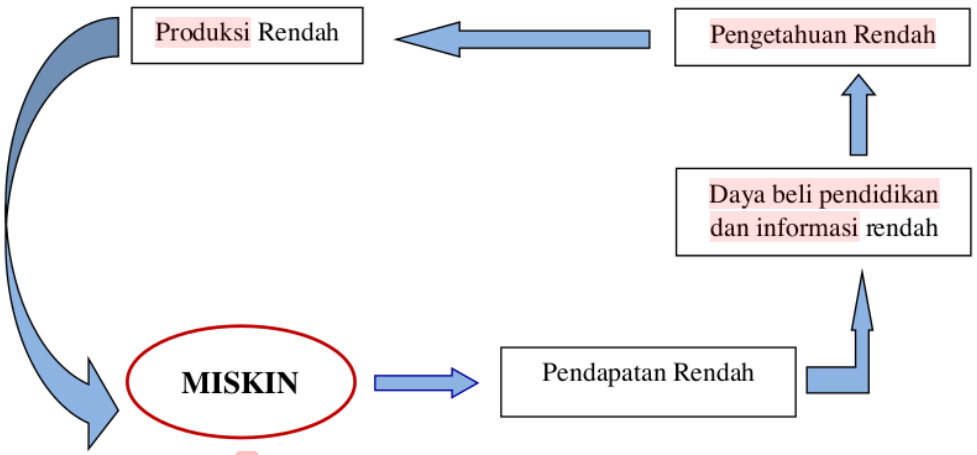

Gambar 1. Siklus kemiskinan dari sisi pendapatan.

Kedua, yaitu jika siklus dilihat dari sisi tabungan yang mana individu miskin atau suatu kelompok masyarakat miskin memiliki tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah menyebakabkan si miskin memiliki modal yang kecil untuk usaha atau melakukan aktifitas perekonomian. Secara umum modal yang kecil mengakibatkan tingkat produktifitas rendah sehingga produksi juga rendah. Dikarenakan produksi yang rendah maka pendapatan yang dihasilkan juga rendah. Sehingga, jadilah individu atau kelompok masyarakat tersebut tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai dengan ada suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah atau menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Adapun siklus ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

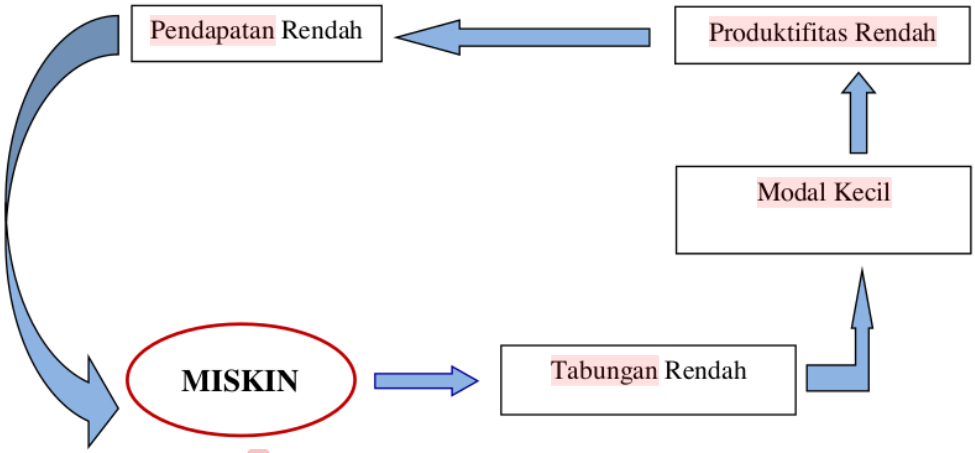

Gambar 2. Siklus kemiskinan dari sisi tabungan,

Ketiga, yaitu jika siklus dilihat dari sisi konsumsi. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada umumnya individu atau kelompok masyarakat miskin memiliki tingkat konsumsi yang rendah termasuk juga konsumsi atas papan, sarana dan prasarana yang juga masih rendah. Dengan tingkat konsumsi yang rendah dapat menyebabkan status gizi juga rendah. Status gizi yang rendah berakibat pada tingkat kesehatan yang rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang baik pada umumnya didukung oleh gizi yang baik pula. Apabila suatu individu atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka kinerja yang dihasilkan juga relatif rendah. Kinerja yang rendah menimbulkan tingkat produktifitas juga rendah. Tingkat produktifitas yang rendah menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tersebut berada dalam kondisi tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai ada suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah atau menuju pada kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Adapun siklus tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

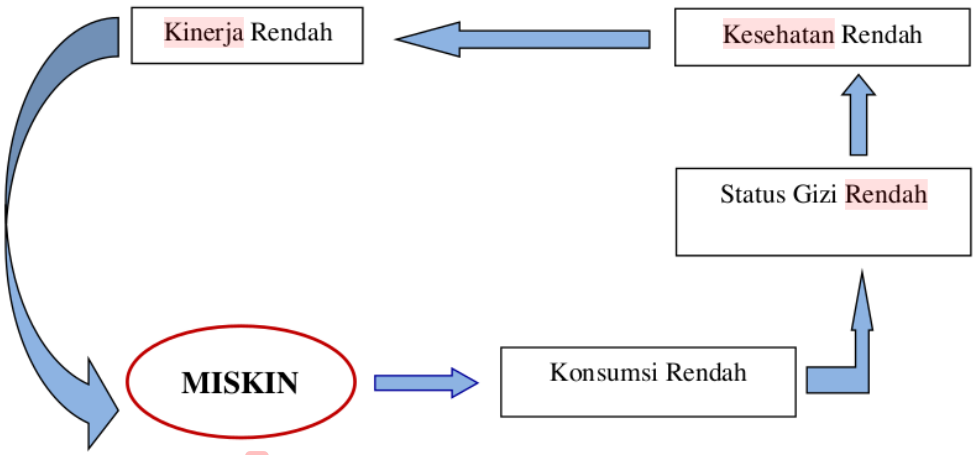

Gambar 3. Siklus kemiskinan dari sisi konsumsi.

2.4 Indikator Kemiskinan

Dalam menetapkan seseorang sebagai warga yang miskin atau bukan tidak boleh sembarangan memberikan kriteria tanpa disepakati baik oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat luas. Karena itu badan Pusat Statistika menetapkan 14 variabel untuk menentukan keluarga/ rumah tangga yang di kategorikan termasuk keluarga miskin dan atau keluarga sangat miskin (KSM). Di bawah ini merupakan karakteristik yang akan menentukan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang dikeluarkan oleh BPS.

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m^2 , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau lainnya.

Jika minimal 9 variabel diatas terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai miskin. Selain itu, keluarga dikatakan miskin dapat dilihat dari segi pendapatan seseorang. Berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS yaitu, seseorang yang berpenghasilan Rp 12.066 perhari atau setara Rp 361.990 perbulan adalah orang yang dikategorikan tidak miskin. Baru dikatakan miskin apabila pendapatan masyarakat kurang dari Rp 12.066. data kriteria kemiskinan ini dapat berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi sosio ekonomi masyarakat di tiap tahunnya.

2.5 Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan umumnya diukur berdasarkan sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin diidentifikasi sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2016). Sedangkan, garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemikinan makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan makanan ditentukan dari nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori

perorang perhari (Suharto dkk, 2002). Sedangkan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu indikator kuantitatif dari kemiskinan antara lain adalah tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat konsumsi rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan indikator kualitatif antara lain adalah tingkat pendidikan, kondisi rumah yang dihuni, dan sebagainya. Menurut Haughton dan Khandker (2009), pendekatan kemiskinan secara menyeluruh berfokus pada kapabilitas individu terhadap fungsinya dalam masyarakat. Secara umum orang miskin kurang memiliki kapabilitas. Mereka tidak memiliki pendapatan, pendidikan, kesehatan yang cukup atau kurang memiliki kebebasan politik. Oleh karena itu pengukuran kemiskinan penting untuk dilakukan. Terdapat empat alasan untuk mengukur kemiskinan (Haughton dan Khandker, 2009): penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan; 2) untuk mengidentifikasi individu atau kelompok masyarakat miskin sehingga target dari intervensi kebijakan yang *pro poor* dapat tercapai; 3) untuk melakukan monitor dan evaluasi atas intervensi kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan; dan 4) untuk melakukan evaluasi atas efektifitas kelembagaan yang menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Langkah utama untuk mengukur kemiskinan adalah mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan seperti pendapatan per kapita atau konsumsi per kapita. Secara prinsipnya pendapatan adalah konsumsi ditambah dengan perubahan dalam kekayaan suatu individu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam *permanent income hypothesis* konsumsi dapat mengukur pendapatan permanen karena konsumsi suatu individu dipengaruhi oleh pendapatan permanennya. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan melalui nilai konsumsinya layak dilakukan.

Menurut Ravallion (1998), terdapat tiga langkah untuk mengukur kemiskinan. Pertama, seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan. Kedua, menetapkan standar minimum kehidupan individu, yaitu kebutuhan minimal seorang individu yang harus dipenuhi, selanjutnya disebut garis kemiskinan. Ketiga adalah membuat deskripsi data sebagai informasi agregat dari garis kemiskinan suatu masyarakat yang menjadi kajian.

2.6 Kebijakan Publik

Kebijakan publik erat kaitannya dengan apa yang pemerintah lakukan dan pemerintah perintahkan baik melalui undang-undang, peraturan maupun himbauan sekalipun. Dalam buku *The Public Policy Theory Primer,* banyak ahli mendefinisikan kebijakan publik. Satu yang paling popular adalah definisi menurut Thomas R. Dye, *"whatever government choose to do or not to do"* (Dye 1987: 1) yang berarti "segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah." Selain menurut Dye, definisi kebijakan public menurut Eyestone adalah *"the relationship of governmental unit to its environment"* (Eyestone 1987: 18) atau " hubungan unit pemerintah dengan lingkungannya."

James Anderson (dalam Smith dan Larimer, 2009: 3) juga mengemukan bahwa kebijakan publik adalah *"purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern"* (1994: 5) yang berarti "tindakan atau tidak bertindak yang memiliki sesuatu tujuan yang dilakukan oleh seorang aktor dalam menangani masalah atau suatu urusan." Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Nugroho, 2014:125) kebijakan publik adalah "suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu *(a projected*

program of goals, values, and practices).” Sedangkan menurut Riant Nugroho (2014:129), kebijakan publik adalah “setiap keputusan yang dibuat oleh negara. Kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi. Untuk menuju kepada masyarakat yang dicitacitakan.”

Menurut definisi-definisi diatas juga dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama kebijakan publik yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilaukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisahpisah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah (Agustino, 2012:8-9).

Untuk mengatasi permasalahan *Rural Poverty* hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah, menyediakan akses kredit dan jas keuangan, meningkatkan produktivitas pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat, merangsang perdagangan skala kecil dan perbaikan manufaktur.

Selain itu menurut Janvry :

> *“Democratization, particularly in the context of the decentralization of governance, opens up important roads for alternative approaches to rural development”*

Dari pendapat Janvry diatas, demokrasi dalam konteks pemerintahan mempunyai peranan penting sebagai pendekatan alternatif dalam pengembangan pedesaan. Jadi peran pemerintah yang demokratis akan membantu dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan pedesaan termasuk kemiskinan. Memberantas kemiskinan di pedesaan melalui kebijakan yang efektif tetap menjadi tantangan bagi masyarakat. Kabupaten Trenggalek membutuhkan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Untuk itulah program GERTAK dibuat.

2.7 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mendalami proses implementasi, maka di perlukan pemahaman akan konsep implementasi itu sendiri. Untuk memahami konspe implementasi itu Harold Laswell (1956) menggagas suatu pendekatan proses (*policy process approach)*. Dalam konsep yang di gagasnya itu, Laswell mengurai beberapa tahapan kebijakan publik menjadi beberapa tahapan, yaitu: (1) agenda-setting, (2) formulasi, (3) legitimasi, (4) implementasi, (5) evaluasi, (6) reformulasi, (7) terminasi. Dari siklus kebijakan tersebut terlihat jelas bahwa implementasi merupakan bagian atau tahapan dari proses suatu kebijakan publik dirumuskan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab 2004:65) implementasi kebijakan merupakan upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Sedangkan van Mater dan Horn (1974) mendifinisikan implementasi sebagai "*policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or gorup) that are directed at the achiecment of objectives set forth in prior policy decisions"* yang secara garis besarnya berarti "Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok)

yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan menurut Widodo (2001: 191) menyatakan bahwa sebuah kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hali ini disebabkan karena implementasi. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realitas nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Menurut Pendapat Purwanto (2012: 21) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output)* yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Masih menurut Purwanto, (2012: 72) yang menjelaskan tentang proses implementasi kebijakan publik. Berikut pendapat Purwanto tentang proses implementasi kebijakan publik.

Gambar 2.1. Proses implementasi kebijakan menurut Purwanto

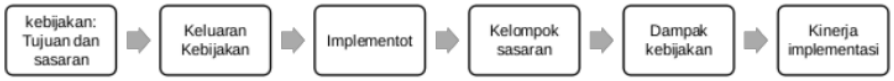

Sumber: Purwanto (2012: 72)

Berdasakan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional,baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

2.8 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performasi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan sosial, ekonomi juga politik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van horn antara lain:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen

Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksan. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap / Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karna kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, social, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

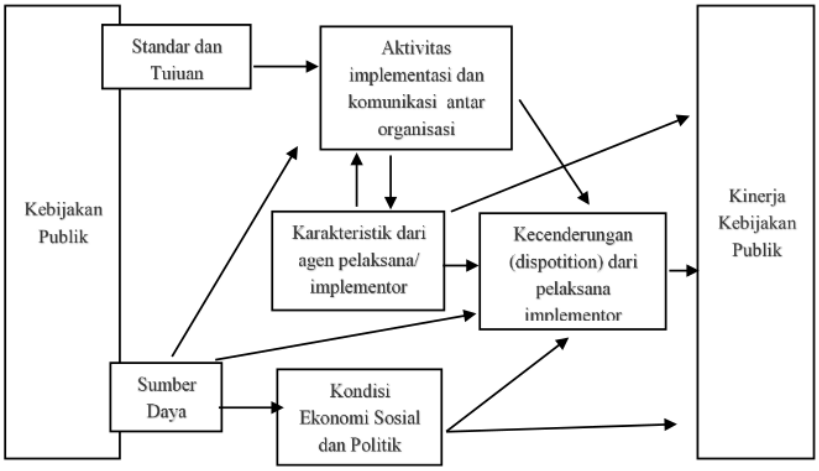

Gambar 2-2. Model pendekatan Van Meter dan Van Horn

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yang dimulai pada Bulan November sampai dengan Bulan Desember. Lokasi pengambilan sampel meliputi wilayah Kabupaten Trenggalek.

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) (Singarimbun dan Effendi, 1987). Responden adalah Bupati Trenggalek, pejabat di BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek selaku koordinator program penanggulangan kemiskinan di daerah. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa serta aparatnya selaku pelaksana paling bawah dalam pengimplementasi program di kantung-kantung kemiskinan.

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat dan pemerintah pada level provinsi atau kabupaten/kota di Kabupaten Trenggalek seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) dan kantor desa/kelurahan. Sedangkan data primer yang dikumpulkan meliputi mata pencaharian, indikator-indikator kemiskinan, bentuk-bentuk program pemerintah, serta jenis-jenis kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan dan lain-lain. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang saling terkait dengan wilayah riset. Fokus penelitian adalah kelompok penduduk miskin. Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan pengenalan akan kondisi lapang dan informasi awal yang telah diperoleh dari informan kunci (*key informan*).

3.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data-data seperti jenis mata pencaharian responden, jenis dan bentuk intervensi (program) yang telah dilakukan oleh pemerintah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan peluang usaha masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek dianalisis melalui penafsiran kompilasi data, dengan menggunakan acuan dari studi literatur dan juga logika verbal sesuai dengan variabel dengan melakukan pengujian data.

3.5 Skema Penelitian

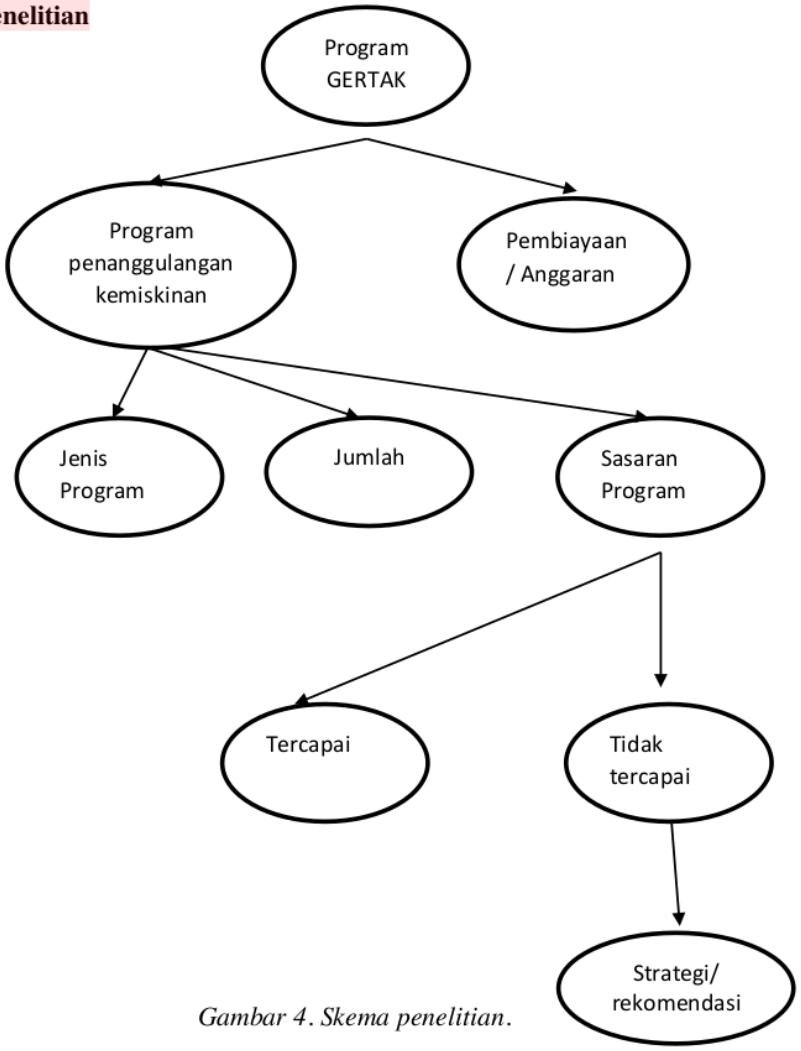

Gambar 4. Skema penelitian.

Dimulai dari penggalian informasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan (jenis program dan sasaran) di kabupaten/kota, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Bedasarkan informasi-informasi di atas, dibuat beberapa rekomendasi untuk perbaikan program yang sudah berjalan maupun menyusun program baru berdasarkan potensi daerah.

Dalam penelitian sampel wilayah adalah sampel representatif sedangkan sampel infor-man atau subyek penelitian menggunakan sampel teoritik yaitu sampel kelompok populasi, peristiwa, kegiatan yang diperlukan untuk diketahi perbedaan dan starteginya. Oleh karena itu maka pemlihan informan harus da-pat menampilkan peristiwa yang berhubungan dengan fokus yang sedang diteliti. Dengan pertimbangan itu maka subyek atau informan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat , yaitu, (1) mewakili kelompk negara (state), pejabat pemerintah dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, (2) mewakili kelompok UPK sebagai pelaksana dari program pengentasan kemiskinan, (3) masyarakat yang men-dapatkan fasilitas program, dan (4) adalah para pakar dan akademisi yang menguasai masyarakat yang mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Georgrafis dan Administratif Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satua kabupaten di Jawa Timur yang memiliki permasalahan kemiskinan. kemiskinan tersebut adalah problem yang sulit untuk diatasi kecuali diimbangi dengan komitmen dan semangat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan inovativ. Untuk itu dibentuklah TKPKD (Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Trenggalek dalam implementasi program termasuk program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek merupakan *Leading Sector* dalam mensukseskan program ini. Dari uraian diatas, maka misi dari bab ini adalah *pertama,* berusaha menguraikan tentang wilayah Kabupaten Trenggalek. *Kedua,* berusaha menguraikan profil dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai *Leading Sector* dalam perencanaan dan implementasi Program GERTAK. Serta yang *ketiga* adalah memaparkan kondisi kemiskinan dan penyebab kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek merupakan Daerah yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur, yang secara astronomis terletak pada 111^{o} 24' – 112^{o} 11' Bujur Timur dan 7^{o} 53' – 8^{o} 34' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.205,22 Km^2. Kabupaten Trenggalek secara ketinggian tempat terdiri dari 2/3 wilayah pegunungan dan 1/3 lainnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-690 meter diatas permukaan air laut. Dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan. Dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan dataran rendah

memiliki ketinggian antara 0 hingga diatas 100 meter diatas permukaan laut, dan ketinggian tersebut 53,8% berketinggian 100-500 m. Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Adapun batas wilayah Kabupaten Trenggalek yakni adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
b. Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
d. Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Apabila dilihat dari Peta maka Kabupaten Trenggalek akan tampak sebagai berikut :

Gambar 3.1. Peta Kabupaten Trenggalek
Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek*

Secara administratif Kabupaten Trenggalek dibagi habis menjadi 14 kecamatan, 152 desa, 5 Kelurahan, 540 dusun/lingkungan. 1.290 Rukun Warga (RW) dan 4.502 Rukun Tetangga. Persebaran kelurahan berada di Pusat Kabupaten Trenggalek. Sedangkan desa tersebar di daerah pinggiran dan perbatasan Kabupaten Trenggalek. Dibawah ini merupakan data persebaran desa/kelurahan pada setiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

4.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pelaksana tugas di bidang perencanaan pembangunan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek merumuskan gambaran mengenai keadaan masa depan yang diinginkan melalui visi **"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek yang Aspiratif, Partisipatif, Terpadu dan Akuntabel".** Dari visi tersebut mencerminkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek mempunyai *goal* dalam merencanakan program-program pembangunan aspiratif dalam arti rencana- rencana pembangunan yang diakomodir oleh BAPPEDALITBANG nantinya akan memberikan implikasi yang baik; partisipatif dalam artian ada gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan. Terpadu dengan arti selaras, koheren dan seimbang serta akuntabel yakni semua yang menjadi rancangan dan hasil dari BAPPEDALITBANG dapat dipertanggungjawabkan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak

yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu 3 misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan Perencanan dan Pengendalian Tata Ruang dalam Mendukung Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan, Pengendalian dan Penelitian Pengembangan untuk Pembangunan Daerah

Bidang yang menangani penerapan Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek adalah Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan khususnya Sub Bidang Sosial Budaya. Hal tersebut diasumsikan bahwa masalah kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan terencana dan tepat. Adapun Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan sosial budaya
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan sosial budaya
3. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan sosial budaya
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan sosial budaya
5. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja, sosial, kebudayaan, pemuda dan olah raga, komunikasi dan informasi, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sumberdaya manusia, dan keagamaan

6. Melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja, sosial, kebudayaan, pemuda dan olah raga, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sumberdaya manusia, dan keagamaan.
7. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan sosial budaya
8. Melakukan pendataan hasil kerja perencanaan usaha perekonomian
9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut diatas, maka BAPPEDALITBANG dalam setiap tahunnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 melaksanakan 6 jenis kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah yakni :

1. Membangun mekanisme perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan orang miskin
2. Membangun tranparasi proses penganggaran
3. Membangun sistem pengawasan dan implementasi program serta partisipatif.
4. Menyusun rencana program/proyek untuk tahun yang akan dating

5. Melaksanakan program/proyek yang sedang berjalan yang termasuk dalam bidang tugasnya dan mengendalikan program/proyek yang dilaksanakan oleh instansi/dinas yang bersangkutan.
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/proyek tahun sebelumnya.

Dari keenam jenis kegiatan yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah maka BAPPEDALITBANG dipilih menjadi *Leading Sector* dalam pelaksanaan Program GERTAK. Selain itu, pemilihan BAPPEDALITBANG sebagai *Leading Sector* dalam implementasi Program GERTAK dikarenakan BAPPEDALITBANG merupakan sekretariat TKPK secara kelembagaan. Secara garis besar fungsi dari secretariat adalah mempersiapkan kerja tim dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Program GERTAK merupakan program yang dibuat untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan demikan, BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek mempunyai peran besar dalam pelaksanaan program GERTAK.

4.3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek

Lebih lanjut dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan tepat sasaran, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPKD merupakan wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan. TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Program GERTAK merupakan program lintas perangkat Daerah dimana program ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang akan efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggung jawab semua pihak sehingga akan melahirkan sinergitas dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek dibentuk untuk mensukseskan visi pemerintah kabupaten Trenggalek yakni **"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman dan Takwa".**

4.4. Gambaran Umum Program GERTAK

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu percepatan penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Kemiskinan bahkan merupakan masalah global yang tertuang dalam tujuan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) yaitu *No Poverty*.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, maka perubahan atau inovasi yang dilakukan, yaitu melakukan pengembangan sebuah Sistem Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi melalui Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan). Inovasi ini telah mampu memenuhi prinsip-prinsip: 1) Efektif dan efisien, 2) Responsif dan *equaly*, 3) Transparan, 4) Akuntabel, dan 5) Partisipatif.

Upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sebelum dilaksanakannya inovasi pembangunan daerah ini, masih belum berjalan secara efektif yang

ditandai dengan : 1) Belum adanya standart yang sama dalam mendefinisikan profil kemiskinan di daerah; 2) Belum adanya basis data kemiskinan yang valid, update dan terintegrasi yang ditunjang dengan sistem yang menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan program kemiskinan; 3) Belum ada Integerasi antar Perangkat Daerah terkait program dan kegiatan upaya penanggulangan kemiskinan; 4) Belum adanya rumusan strategi pengentasan kemiskinan yang menjangkau sektor riil khususnya terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah; dan 5) Belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Program GERTAK ini sangat terkait dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yaitu "Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas" dimana salah satu prioritasnya adalah Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Sementara Tema RKPD Kab. Trenggalek tahun 2019 adalah "Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Berkulaitas Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan".

Ada beberapa *thematic issue* yang menjadi tantangan yang harus dijawab dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun satu hambatan klise yang sering terjadi di masyarakat adalah pola pikir di masyarakat yang bangga mengaku miskin ketika digulirkan bantuan ke masyarakat. Masalah kemiskinan ini bukan sekedar masalah program atau berapa besar dana yang digulirkan tapi lebih pada masalah moral. Ada *soft campaign* yang harus diberikan pada masyarakat, bahwa ada yang lebih berhak menerima.

Tujuan Program GERTAK adalah meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social secara terintegrasi, sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Sedangkan sasaran Program GERTAK adalah masyarakat miskin

dan rentan miskin di Kabupaten Trenggalek. *Output* yang dihasilkan dari Program GERTAK adalah tersedianya Sistem manajemen Data Kemiskinan Teritegrasi yang menjadi rujukan satu data sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana RPJMD, Program GERTAK adalah Program Lintas Perangkat Daerah yang menjadi barometer percepatan penurunan angka kemiskinan. Tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek sebesar 12,02% (BPS, 2018). Di awal RPJMD angka kemiskinan tercatat 13,39%, dan di akhir periode RPJMD ditargetkan turun menjadi 11,00-11,50 %. *Outcome* lainnya dari Program GERTAK selain menurunkan angka kemiskinan juga menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

BAB V. PEMBAHASAN

5.1. Kebijakan Program GERTAK

Kabupaten Trenggalek telah mengimplementasikan suatu konsep strategi dan kebijakan agar Program GERTAK bisa bersifat operasional yaitu konsep yang disebut dengan *Self Define Poverty System (SDPS)* yang dijabarkan melalui 5 (lima) Strategi yaitu:

1) Golden Standart Klasifikasi;
2) Mekanisme Mutasi;
3) Sistem Rujukan Terpadu (SRT);
4) Bina Ekonomi Rakyat;
5) Evaluasi dan Redefinisi.

Regulasi Terkait Program ini adalah : 1) Perda No 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang RPJMD; 2) Perbup No 10 Tahun 2015 Tentang Pedum Anty Poverty Program; dan 3) Perbup 13 tahun 2016 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaan Program GERTAK tentunya terdapat kendala yang dihadapi, namun berbagai kendala tersebut selalu diupayakan agar dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1) Belum optimalnya peran dan fungsi seluruh anggota TKPKD dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan;
2) Kelembagaan TKPKD yang bersifat *ad hoc* dimana dalam penyelenggaraan layanan Posko GERTAK secara administratif dilaksanakan beberapa OPD;
3) Masih adanya *inclusion* dan *exclusion error* dalam penentuan sasaran program perlindungan dan jaminan sosial;

4) Masih tingginya “Blind Spot” jaringan telekomunikasi dan internet sehingga belum semua desa dapat menggunakan sistem secara “online”; dan
5) Kondisi geografis, pendidikan, ekonomi, sistem religi dan sosial budaya yang masih kental tumbuh di tengah masyarakat dimana masih ada masyarakat yang sebenarnya dalam kondisi mampu masih menuntut kepada pemerintah untuk mendapatkan program jaminan sosial.

Berdasarkan data kemiskinan makro, penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dari Tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebnayak 89.968 jiwa (13,10%). Angka kemiskinan cenderung mengalami stagnansi dan perlambatan, bahkan pada Tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 92.170 jiwa (13,39%) sehingga perlu upaya-upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Sejak di-launching pada tanggal 12 Mei 2016, Program GERTAK berhasil menurunkan angka kemiskinan 3 (tiga) Tahun berturut-turut dari 2016 turun menjadi 91.490 jiwa (13,24%), tahun 2017 kembali turun menjadi 89.770 jiwa (12,96%), dan tahun 2018 turun signifikan menjadi 83.500 jiwa (12,02%).

Hasil Implementasi Program GERTAK diantaranya adalah terciptanya layanan sehari (*one day service)* untuk pemohon Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus masyarakat miskin dan tersedianya *Prototype* Sistem Manajemen Data Kemiskinan Terintegrasi yang dikelola Posko GERTAK dimana tingkat persentase tindak lanjut laporan dari masyarakat hingga Bulan Desember Tahun 2018 mencapai 95,43% dengan tindak lanjut laporan sejumlah 6.721 dari total 7.043 aduan/laporan.

5.2. INPUT

5.2.1. Anggaran

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan APBD Kabupaten Trenggalek perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan harus tidak menambah beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Anggaran belanja harus mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan keberlanjutan UMK; serta penguatan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sementara Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 ini mencapai Rp. 2,05 Triliyun dimana sekitar Rp. 41 Milyar dialokasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan dan kerentanan sosial, jumlah anggaran ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain APBD Kabupaten, Program GERTAK juga dapat didukung program dan kegiatan dengan pembiayaan APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBDesa.

5.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu di perhatikan oleh setiap daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Untuk membangun kualitas SDM yang bagus, Pemerintah Daerah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatan kapasitas dan pemberdayaan. Dalam penyelenggaraan Program GERTAK yang dikoordinasikan dalam Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), juga didukung oleh Staf Penunjang di Posko GERTAK dan *Task Force* Posko

GERTAK (Pasukan Pink). Selain itu TKPKD juga memiliki jaringan kemitraan bersama Forum CSR, BPJS dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Gambar 4.1. **Pengukuhan Pasukan Pink (1 Juni 2017)**

5.3. Pelaksana Kegiatan Program GERTAK

Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganan dan tanggung jawabnya dilakukan oleh lintas sektor, melibatkan masyarakat serta terkoordinasi dengan baik, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan strategi kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian dan Pemerintah Daerah (stakeholders) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Koordinasi pelaksanaan strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang mempunyai peran dan fungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan. TKPKD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Koordinasi kebijakan disusun sebagai berikut :

1. Penanggung jawab yaitu Bupati Trenggalek
2. Ketua yaitu Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek
3. Wakil Ketua yaitu Sekretaris Daerah yaitu Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Setda Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANGLITBANG)
4. Sekretariat (Posko GERTAK) :
    a. Pokja Pendataan dan informasi
    b. Pokja Pengembangan Kemitraan
    c. Pokja Pengaduan Masyarakat
5. Kelompok Program Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
6. Kelompok Program Berbasis pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin pembangunan yang didasarkan pemberdayaan masyarakat; bertujuan untuk memperkuat kapasitas untuk terlibat dalam pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
7. Kelompok Program Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku UMKM; dan
8. Kelompok Program lainnya, yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

5.4. POSKO GERTAK

Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaran Program GERTAK diantaranya adalah Gedung Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Posko GERTAK yang juga menjadi Sekretariat TKPK dan Sekretariat SDGS dan dilengkapi dengan beberapa Personal Computer untuk mengoperasionalkan Sistem Manajemen Data Kemiskinan Terintegrasi.

Gambar 4.2. Peresmian Posko GERTAK (18 April 2017)

5.5. Impelmentasi Pelaksanaan Program GERTAK

5.5.1. Golden Standart Klasifikasi

Penguatan peran TKPKD harus diawali melalui penguatan peran dan kapasitas pemerintah desa selaku satuan kerja terkecil. Definisi dari kemiskinan dan program kemiskinan disepakati melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan (Musdes/Muskel GERTAK).

5.5.2. Mekanisme Mutasi

Untuk mewujudkan manajemen data kemiskinan yang valid dan *update*, maka dibutuhkan pendekatan teknologi informasi terintegrasi dan partisipatif. Hal ini diimplementasikan melalui penyusunan GERTAK Online sebagai Sistem Manajemen

Data Kemiskinan Terintegrasi, sehingga Program-Program Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek akan menggunakan satu basis data untuk sasaran penerima programnya. Sementara sistem ini juga ditunjang dengan aplikasi berbasis android dinamakan GERTAK Apps. GERTAK Apps dapat digunakan sebagai media layanan pengaduan dan pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk memberikan informasi terkait kemiskinan, kerentanan dan permasalahan sosial lainnya. Selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat survey rumah tangga miskin telah disesuaikan berdasarkan parameter Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan Kementerian Sosial. GERTAK *Apps* dan GERTAK *Online* ini diharapkan dapat secara optimal digunakan mulai tingkat kabupaten sampai dengan desa, dengan mengacu pada konektivitas dan kesatuan data semua unit terintegrasi.

5.5.3 Sistem Rujukan Terpadu (SRT)

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan termarginalkan maka dibentuk Posko GERTAK merupakan wujud Implementasi Sistem Rujukan Terpadu (SRT). Posko GERTAK ini adalah Pusat Sedekah Informasi terkait kemiskinan, kerentanan dan permasalahan sosial lainnya. Dalam Posko GERTAK ini, selain menjadi Sekretariat TKPKD dan Sekretariat SDGs, terdapat pelayanan pengaduan yang melibatkan beberapa OPD terkait, BAZNAS, BPJS, Forum CSR, TKSK dan pengelola program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Trenggalek. Posko GERTAK ini telah diresmikan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa pada 18 April 2017 yang lalu. Selain itu untuk mendukung pelayanan Posko GERTAK juga telah dikukuhkan Task Force Posko GERTAK (Pasukan Pink) bertepatan pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017. Pasukan Pink terdiri dari Komunitas Peduli

Sosial yang secara sukarela membantu Pemerintah Daerah untuk memastikan bantuan program penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

5.5.4. Bina Ekonomi Rakyat

Dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan serta memberikan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui : pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta akses sanitasi dan air bersih. *Anty Poverty Program* (APP), JAPRI (JAdi Pengusaha mandiRI), KEPEL (Kelompok Peningkatan Ekonomi Lokal), Kredit Gangsar, Pengembangan Pertanian Terpadu, Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Program Padat Karya lainnya yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

5.5.5. Restrukturisasi Kelembagaan

Restrukturisasi kelembagaan TKPKD yang menyesuaikan dengan penyelenggaran dan kebutuhan Program GERTAK dan sekaligus pembentukan Sekretariat SDGs adalah upaya pengentasan kemiskinan yang juga merupakan agenda utama dunia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Semua kegiatan TKPKD didokumentasikan melalui media informasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dinamakan “Jurnal GERTAK”. Rencana Kerja lebih rinci dijelaskan dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Diperlukan upaya dan kerja keras dalam menyempurnakan inovasi tersebut sehingga mampu direalisasikan secara proporsional dan tepat tujuan.

5.6. Model Evaluasi CIPP (*Context*/*Input*/*Process*/*Product*) sebagai bagian dari Continous Improvement.

Model CIPP merupakan model evaluasi yang dicetuskan oleh Daniel Stufflebeam pada akhir tahun 1960-an. Model evaluasi ini memiliki sedikit perbedaan dengan model evaluasi lainnya. Khususnya dalam hal sudut pandang dimana evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh. Sebagaimana kepanjangannya CIPP memiliki empat indikator utama yakni konteks, input, proses dan produk. Model evalasi ini akan mengevaluasi mulai dari awal pembuatan kebijakan hingga hasil yang di dapat dari kebijakan ini.

5.6.1. Evaluasi Konteks

Dalam evaluasi konteks, Daniel Stufflebeam memperkenalkan sedikitnya empat poin penting yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi yakni Kebutuhan, Masalah atau isu, Tujuan, dan Peluang. Dari empat poin ini nantinya akan dapat melihat kesesuai antara perogram yang akan dijalankan dengan kondisi yang ada dilapangan.

1) Kebutuhan

   Dalam evaluasi konteks, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi sebuah tujuan yang telah dicapai. Berkaitan dengan program Gertak, maka untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan dengan adanya program tersebut, terlebih dahulu perlu melihat tujuan yang ingin dicapai dari program ini.

   Secara Garis besar tujuan dari program Gertak ini memiliki dua arah utama yakni pembenahan teknis dan juga sosial. Dari segi teknis ini merujuk pada pengelolaan kembali basis data bantuan miskin yang telah ada. Sedangkan dari segi sosial

lebih kepada pembenahan *mainset* masyarakat tentang bantuan kemiskinan dimana untuk bersama- sama "menengok" kembali kondisi kemiskinan disekitarnya.

Maka dari tujuan ini dapat diketahui bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi adalah adanya dasar hukum yang kuat dan petunjuk teknis yang jelas. Dari hal ini pemerintah Trenggalek telah menysusun peraturan khusus program Gertak ini salah satunya adalah Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah. selain itu juga telah disusun SOP atau juknis yakni:

1. Petunjuk Teknis Sosialisasi, Pelayanan dan Pengaduan;
2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Data dan Informasi;
3. Petunjuk Teknis Layanan Bina Ekonomi Rakyat;
4. Petunjuk Teknis Evaluasi dan Redefinisi

Berdasarkan segi kebutuhan akan SOP, maka program Gertak ini sudah dapat dikatakan cukup jelas dan spesifik baik mulai dari sisi pengelolaannya, pelaksanaan disetiap targetnya dan juga penilaiannya.

2) Masalah

Dalam peluncuran program Gertak ini sesungguhnya telah memenuhi atau menjawab isu dan masalah yang dialami di oleh masyarakat Trenggalek khususnya di Desa Bendoagung. Adapun masalah utamanya adalah kemiskinan yang terus berkembang. secara khusus masalah kemiskinan ini disebabkan oleh adanya *exclusion error* dan *inclusion error* yakni warga miskin yang belum terdata bantuan kesejahteraan dan juga warga yang sudah masuk dalam data kemiskinan akan tetapi bukan warga miskin.

Selain itu juga karena adanya *mainset* buruk yang dimiliki oleh masyarakat miskin yakni cenderung menitik-beratkan diri atau hanya mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga pada akhirnya ini akan menimbulkan adanya ketergantungan tanpa kemandirian.

3) Peluang

Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa peluang mendukung suksesnya Porgram Gertak dalam mengentaskan kemiskinan dimana diantarnya adalah peluang dari sisi sosial masyarakat dan peluang dari sisi kerjasama. *Pertama*, peluang dari sisi sosial masyarakat. melihat kembali bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Trenggalek sebagian besar merupakan wilayah pedesaan. Dimana terdapat 152 desa salah satunya adalah Desa Bendoagung dan 5 kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan.

Dengan melihat kembali karakter masyarakat desa dimana memiliki hubungan yang sangat erat antar penduduknya maka ini dapat dijadikan sebagai garda terdepan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu tujuan penempatan ini adalah untuk menepatkan sasaran program atau bantuan dari pemerintah yang selama ini cenderung tidak tepat sasaran.

Kedua, peluang dari sisi kerjasama. Di Kabupaten Trenggalek terdapat beberapa komunitas yakni IST, Pasukan Pink, dan juga tenaga sosisal yakni TKSK dan PKH serta pihak CSR yakni Bank Mandiri dll. Untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek maka telah dilakukan kerjasama dengan beberapa pihak tersebut. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah baik dari segi tenaga maupun dari finansial.

5.6.2. Evaluasi Input

Evaluasi Input ini pada dasarnya merupakan evaluasi pada level perisapan yang akan dijalankan oleh suatu program. Evaluasi tahap ini menurut dari Stufflebeam menyangkut beberapa poin yakni "*...inputs (stategies, operational plan, resources, and agreements for proceding with a needed intervention).* Jadi yang difokuskan dalam evaluasi input adalah berupa strategi, rencana operasional, sumber daya baik itu dalam bentuk manusia, dana, maupun fasilitas penunjang.

1) Strategi

Strategi yang dimaksud disini adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Dari sisi strategi ini, ternyata dalam Program Gertak telah cukup detail dan bersifat teknis. Artinya strategi ini kemudian benar-benar mampu dijalankan untuk mengatasi kemiskinan. Strategi Gertak ini disebut dengan *Self Defined Poverty Syistem* (SDP's) yang mana terbagi menjadi 5 langkah utama :

1. *Golden Standart Clasification*
2. Mekanisme Mutasi Data
3. Sistem Rujukan Terpadu
4. Bina Ekonomi Rakyat
5. Evaluasi dan Redefinis

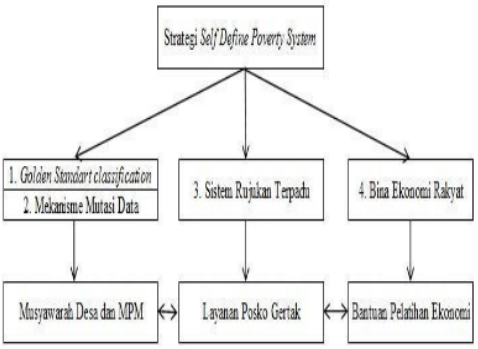

Gambar 4.3. Bagan Pembagian Strategi SDP's

2) Rencana Operasional

Rencana operasional merupakan wujud atau aksi nyata yang digunakan untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan kelapangan. Dalam program Gertak ini, dari lima langkah SDP's dikelompokkan kedalam tiga aksi nyata. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. *Golden Standart Classification* dan mekanisme mutasi data diwujudkan dengan musyawarah desa untuk verifikasi dan validasi data kemiskian
2. Sistem rujukan terpadu diwujudkan dengan posko GERTAK sebagai layanan satu pintu warga miskin
3. Bina ekonomi rakyat dilakukan oleh posko GERTAK, csr dan juga program pemerintah yang telah ada sebagai wujud pelatihan ekonomi bagi mayarakat miskin.

Dari segi Sumber Daya Manusia, Program Gertak ini menyentuh dan menggerakkan berbagai lapisan masyarakat baik dari tingkat Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa hingga warga masyarakat. adanya pengerahan seluruh elemen ini mengingat bahwa adanya keterbatasan dari Pemerintah Kabupaten sendiri.

Sedangkan dari segi pendanaan pemerintah Kabupaten Trenggalek telah merinci berbagai dana yang menyokong program Gertak. Adapun rinciannya adalah:

1. Musdes : Rp 735.120.000,- (satu kabupaten untuk satu kali Musdes) untuk jatah per desa menyesuaikan dengan jumlah peserta. Terdiri dari honor pelaksana, konsumsi dan uang transport peserta
2. Posko GERTAK: Rp 108.000.000,- untuk gaji 6 pegawai pertahun, Rp 350.000.000,- untuk operasional kantor (sekali saat pembangunan).

3. Bina ekonomi rakyat belum ada anggaran tersendiri, masih mengikuti program pelatihan ekonomi yang ada.

Walaupun dana telah dikeluarkan, akan tetapi dalam penggunaannya ternyata hanya habis pada teknis saja tanpa sedikitpun dialokasikan langsung untuk masyarakat miskin yang menjadi sasarannya.

Fasilitas Penunjang. Fasilitas dalam program Gertak ini secara keseluruhan hanya untuk kegiatan teknis penunjang pemerintah dalam peroses pengentasan kemiskinan yang ada di kabupaten Trenggalek, khususnya di Desa Bendoagung. Adapun fasilitas yang dimaksud dalah sebagai berikut:

1. Untuk musdes (disediakan oleh tim musdes) laptop, lcd, kertas dan data. Pihak desa konsumsi
2. Posko GERTAK (berbagai peralatan kantor disediakan oleh pemkab)
3. Bina ekonomi fasilitas disediakan oleh program yang sudah berjalan

Dari fasilitas diatas, khusus untuk masyrakat miskin tidak mendapatkan fasilitas secara fisik ini, akan tetapi mereka mendapatkan hasil pelayanan dan juga bantuan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah.

Estimasi waktu adalah target atau jadwal pelaksanaan yang harus dilakukan oleh pelaksana program Gertak. Berikut ini adalah rincian jadwal yang ditetapkan :

1. Musdes: 4 kali dalam setahun (2 kali dengan pemkab, 2 kali mandiri desa). untuk desa ditarget 1 hari jadi. Untuk pelimpahan le atas maksimal penyerahan data hasil musdes 1 minggu.
2. Posko GERTAK pelayanan setiap hari (jam kantor). Jumlah menyesuaikan jumlah peminta layanan, untuk bantuan kesehatan/bansos maksimal 2 hari, pendidikan 4 hari, KIS 14 hari.

5.6.3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses pada dasarnya merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana atau program yang sedang berlangsung. Jadi evaluasi ini dilakukan ditengah implementasi atau bisa disebut juga dengan *monitoring*. Menurut Daniel, evaluasi ini memiliki tujuan yakni: Untuk melihat sejauhmana para pelaksana program mampu melaksanakan sesuai dengan jadwal, rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain tiu juga menuntun pelaksana program untuk menjalankan rencana sesuai prosedur dan menggunakan anggaran dengan tepat. Dalam evaluasi proses ini, peneliti berfokus pada Implementasi Gertak yang ada di Desa Bendoagung. Evaluasi ini melihat dari sisi persiapan dan juga melihat kesesuaian dari input (SDM, Dana, Waktu) yang telah ditetapkan sebelumnya serta Hasil dari implementasinya.

Persiapan Gertak masih belum maksimal hal ini dapat diketahui dari beberapa hal yakni:

1. Telah mengikuti koordinasi dan briefing dari pemkab tentang musdes akan tetapi hanya satu kali.
2. Telah melakukan koordinasi dengan RT/RW dan tokoh masyarakat tentang pencatatan kembali warga miskin akan tetapi tidak disertai dengan teknik pencatatan kemiskinan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan.
3. Tidak melihat BDT yang ada di desa

Selain itu untuk program Gertak lainnya yakni posko Gertak dan Bantuan Peningkatan ekonomi ini sepenuhnya dijalankan terpusat di Kabupaten Trenggalek. Sehingga pemerintah Kabupaten Trenggalek hanya memiliki wewenang untuk mengusulkan bantuan saja tanpa ikut mengelola.

Dari estimasi waktu, jika dilihat dari sisi waktu yang telah ditetapkan di Input, maka dalam proses pelaksanaan Gertak yang menyasar Posko Gertak dan Bina Ekonomi masih terjadi penyimpangan dan kesalahan dimana diantaranya adalah:

1. Musdes. Dari estimasi waktu yang ditetapkan yakni 4 kali musdes, di Desa hanya 1.
2. Layanan Posko GERTAK. Untuk layana posko GERTAK, ad desa masih satu kali mengajukan bantuan bagi warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan, dan hanya mendapatkan beberpa jatah bantuan per bulan.
3. Bina Ekonomi Rakyat. Untuk bina ekonomi rakyat masih mengikuti pelatihan ekonomi PKH yakni 1-2 bulan sekali.
4. Hasil. Walaupun dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan, akan tetapi program Gertak telah sedikit membuahkan hasil.

5.6.4. Evaluasi Produk

Evaluasi produk ini dilakukan dengan tujuan utamanya adalah untuk memastikan sejauh mana program mampu menjawab kebutuhan dari penerima manfaat. Dalam evaluasi ini, Daniel Stufflebeam menejelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi produk. *Pertama*, evaluator harus menilai hasil yang diinginkan maupun tidak diinginkan. *Kedua*, hasil negatif maupun positif dari yang dievaluasi. Dalam evaluasi produk ini lebih kepada dampak atau apa yang dirasakan dari adanya program Gertak ini bagi masyarakat miskin Desa Bendoagung baik itu hal positif maupun negatif. Dari sisi positif adalah sebagai berikut :

1. Membantu meringankan kebutuhan pokok
2. Masyarakat miskin bisa mulai menabung

3. Mendapakan fasilitas kesehatan dan pendidikan
4. Sedangkan dari sisi negatif adalah sebagian besar masyarakat miskin masih ingin terus mendapatkan bantuan serta tidak begitu memiliki semangat untuk mandiri dan mencoba lepas dari bantuan yang telah diterimanya.

5.7. Analisa Manajemen Strategi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Menurut David (2006:3) Manajemen Strategi (strategic management) didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003) untuk mengetahui manajemen strategi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kekiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek terhadap program tersebut. Teori proses manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen ini mencakup empat variabel, antara lain pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.

5.7.1. Pengamatan Lingkungan

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam manajemen strategi adalah pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Yang mana dari kedua faktor tersebut nantinya dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, atau biasa disebut dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath) dari Program

Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Kekuatan yang dimiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Program GERTAK terdiri dari beberapa aspek antara lain struktur kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten, serta komitmen petugas. Setelah adanya Program GERTAK struktur kelembagaan TKPKD telah direstrukturisasi sesuai dengan kebutuhan program GERTAK sehingga kelembagaan TKPKD Kabupaten Trenggalek saat ini dapat bekerja lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Dimana kelembagaan TKPKD dibagi dalam tiga Kelompok Kerja (Pokja) meliputi Pokja pendataan dan informasi, pengembangan kemitraan, serta pengaduan masyarakat.

Kemudian kekuatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek juga didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten. Dimana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek juga telah menyediakan petugas khusus untuk memberikan layanan pengaduan terpadu bagi masyarakat miskin yang mempunyai latar belakang bidang Psikologi, Ilmu Teknologi dan Administrasi Publik dan membentuk tim sukarelawan yang diberi nama pasukan Pink untuk memastikan bahwa seluruh bantuan program kemiskinan yang ada dapat tepat sasaran.

Kemudian kekuatan lain yang dimiliki yaitu omitmen para petugas yangdibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Wow Services Excellence dari Mark Plus dimana pada satu tahun pertama program GERTAK diresmikan para petugas telah menanggani sekitar 3000 laporan terkait masalah kemiskinan.

Dalam pelaksanaan program, selain ada kekuatan pasti ada kelemahan. Begitu juga dengan Program GERTAK yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Trenggalek. Kelemahan yang dimiliki adalah fasilitas yang kurang memadai Dengan jumlah komputer yang berjumlah lima unit, mengakibatkan beberapa petugas tidak memegang komputer. Selain itu keterbatasan printer berwarna membuat pelayanan terhambat. Kemudian dengan keterbatasan gedung dimiliki, maka belum ada ruangan khusus untuk server data kemiskinan padahal idealnya ruangan tersebut ada.

Selain fasilitas yang kurang memadai, yang menjadi kelemahan adalah minimnya anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa meskipun anggaran bagi masyrakat miskin sudah disediakan oleh Baznas akan tetapi anggaran untuk musdes GERTAK, sarana prasarana dan rekruitmen serta gaji petugas Posko GERTAK masih kurang memadai karena hanya mengandalkan dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Dalam pelaksanaan Program GERTAK untuk menanggulangi masalah kemiskinan, setelah mengetahui faktor internal yang dimiliki juga harus melihat faktor eksternal yang ada. Dalam faktor internal terdapat dua hal yang harus diketahui yaitu peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki Tim KoordinasPenaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu bahwa Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) tersebut dapat dicontoh dan diterapkan oleh darerah lain. Artinya program tersebut dapat dijadikan sebagai referensi inovasi atau alternatif kebijakan bagi daerah yang memiliki masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Peluang tersebut juga diperkuat dengan diterimanya beberapa penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah melakukan inovasi terhadap penanggulangan masalah kemiskinan yaitu penghargaan WOW Services excellence 2017 dari Mark Plus dan penghargaan Golden Otonomi Award pada tahun 2018.

Selanjutnya peluang lain yang dimiliki TKPKD yaitu adanya kerjasama dengan beberapa OPD terkait, Baznas, CSR, dan Komunitas Peduli Sosial Kabupaten Trenggalek. Kemudian peluang lainnya adalah antusias dari masyarakat Kabupaten Trenggalek. Dengan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat Kabupaten Trengalek ini mampu memberikan dorongan tersendiri bagi Tim Koordinasi Penanggulangan untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan Progam GERTAK tersebut.

Di samping ada peluang yang dimiliki, pasti ada ancaman atau kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan. Ancaman yang harus diselesaikan oleh TKPKD Kabupaten Trenggalek adalah kemungkinan masih ditemui banyaknya masyarakat yang mengaku miskin. Ancaman lain yang ada dalam pelaksanaan Program GERTAK yaitu masih banyaknya masyarakat yang mengaku miskin, awam terhadap teknologi informasi dan kondisi wilayah yang susah jaringan internet. Hal tersebut disebabkan karena seperti yang diketahui bahwa topografi di Kabupaten Trenggalek sangat beragam, dan mayoritas wilayahnya adalah pegunungan. Jadi tidak semua daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek mempunyai jaringan internet yang mendukung. Sehingga dapat menghambat mekanisme data kemiskinan yang valid dan up to date.

5.7.2. Perumusan Strategi

Perumusan atau Pembuatan Strategi, Niswah dan Meirinawati (2015:1) merupakan proses pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif-alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi. Pada tahap ini TKPKD Kabupaten Trenggalek berupaya untuk memaksimalkan faktor kekuatan, memanfaatkan faktor peluang, dan mengurangi faktor ancaman dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan Program GERTAK. Proses perumusan strategi ini meliputi tahap merumuskan misi, menentukan tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

Dalam penentuan misi, TKPKD Kabupaten Trenggalek melakukan diskusi atau rapat terkait masalah kemikinan yang bertujuan sebagai tindak lanjut dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan. Kemudian dalam perumusan strategi TKPKD Kabupaten Trenggalek didasarkan pada pengamatan yang terlihat dilapangan bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Trenggalek yang bangga mengaku miskin dan data kemiskinan yang kurang valid up to date. Selanjutnya untuk mencapai misi dan tujuan program, maka hal yang diperlukan selanjutnya adalah strategi dalam lembaga atau organisasi tersebut. Dalam Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek mengembangkan lima strategi yaitu pertama Golden Standart Klasifikasi dimana definisi kemiskinan disepakati bersama melalui mesdes/muskel GERTAK, mekanisme mutasi yaitu guna mewujudkan data kemiskinan yang valid dan up date dibutuhkan teknologi

dan informasi yang terintegrasi dan partisipatif. Hal ini diimplementasikan melalui GERTAK Online, dan aplikasi berbasis android GERTAK Apss. Ketiga Sistem Rujukan Terpadu (SRT) yang disebut Posko GERTAK sebagai wujud pelayanan prima bagi masyarakat miskin, rentan dan termaginalkan. Keempat bina ekonomi rakyat, dimana pada tahap ini masyarakat yang masih produktif akan dibina dengan program berkelanjutan. Dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Trenggalek serta berkolaborasi dengan mitra usaha yang dipilihkan pemerintah. Kelima Evaluasi Redefinisi, dimana program GERTAK senantiasa melakukan evalusi paling tidak delapan kali dalam satu tahun.

5.7.3. Implementasi Strategi

Tahap selanjutnya adalah implementasi strategi. Menurut Kuncoro (2005) Implementasi Strategi, yaitu proses pelaksanaan strategi yang telah diformulasikan dalam tindakan nyata. Tahap ini merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam bentuk tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Untuk pelaksanaan program GERTAK TKPKD Kabupaten Trenggalek diawali dengan golden strandrt klasifikasi, dimana definisi kemiskinan dan verifkasi data kemiskinan disepakati bersama melaui musdes/muskel GERTAK. selanjutnya data hasil musdes tersebut diserahkan pada sekretariat TKPKD untuk ditindak lanjuti dan membuat rekayasa kebijakan yang paling tepat. Kemudian guna mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat miskin TKPKD Kabupaten Trenggalek juga membuat suatu layanan rujukan terpadu Posko GERTAK. selain itu guna mewujudkan data yang

valid dan update TKPKD Kabupaten Trenggalek juga membuat GERTAK Apss dan GERTAK Online.

Akan tetapi, dalam pelaksaannya masih ditemukan beberapa kendala yakni kurangnya keterlibatan kelompok sasaran yakni masyarakat miskin dan monitoring dari TKPKD Kabupaten Trenggalek dalam proses musdes/muskel GERTAK, dan awamnya masyarakat kabupaten Trenggalek terhadap teknologi informasi.

Kemudian selain pelaksanaan program, hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi yaitu anggaran.Pada Program GERTAK aspek dana berasal dari APBD. Selain itu juga didukung dengan adanya kerjasama dengan beberapa OPD terkait, Baznas, Forum CSR dan juga Komunitas Peduli Sosial yang ada di Kabupaten Trenggalek sehingga dapat menunjang anggaran yang dibutuhkan dalam Program GERTAK.

Selanjutnya juga dilakukanya pengembangan program GERTAK di Kabupaten Trenggalek dengan mensinergikan program GERTAK dengan Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dari pemerintah pusat. Sehingga pelaksanaan program GERTAK dapat berjalan lebih efektif.

5.7.4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi stratejik menurut Prawirosentono, dkk (2014) adalah menilai setiap aktivitas gara seluruh kegiatan staetegi sesuai dengan yang direncanakan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek melakukan evaluasi secara berkala yaitu setiap hari, satu minggu sekali, setiap bulan, setiap triwulan, satu tahun dua kali dengan kepentingan evaluasi yang berbeda–beda sehingga output yang dihasilkan juga berbeda setiap evaluasi. Evaluasi harian yang

dilakukan oleh pelaksana layanan posko gertak, yang bersifat oprasional dan teknis. Selanjutnya evaluasi yang dilakukan satu bulan sekali, yang disebut sebagai evaluasi tim. Dimana pada evaluasi ini mulai melibatkan ketua harian Posko GERTAK. Kemudian evaluasi setiap tiga bulan sekali dimana evaluasi tersebut tidak membahas tentang permasalahn teknis dan oprasional. Akan tetapi lebih kearah yang bersifat strategis. Dan yang terakhir evaluasi yang dilakukan satu tahun dua kali. Evaluasi ini dilakukan oleh seluruh dinas-dinas terkait dalam Program GERTAK. Adapun yang dibahas dalam evaluasi tahap ini yaitu terkait konsep baru guna menyempurnakan dan mengoptimalkan program GERTAK.

Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam proses evaluasi Program GERTAK ini adalah dokumen penanggulangan kemiskinan daerah. Dimana dalam dokumen tersebut terdapat kebutuhan ataupun tuntutan dari masyarakat miskin. Selain itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah juga membuat suatu jurnal kemiskinan yang diberi nama Jurnal GERTAK. Adapun fungsi dari jurnal GERTAK ini adalah untuk memberikan transparansi kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat juga ikut memonitoring Program yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek benar-benar berusaha keras dalam melaksanakan Program GERTAK, guna menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Walaupun masih ada beberapa kekurangan atau kendala yang harus diselesaikan. Hal tersebut dibuktikan dalam penjelasan berikut ini

Dalam proses pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah membuahkan hasil, yaitu dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki berupa struktur kelembagaan yang lebih spesifik, kemudian juga diperkuat dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten karena terdiri dari SDM yang mempunyai latar belakang psikologi, ilmu teknologi dan administrasi publik dan komitmen dari para staff yang bertugas dalam melaksanakan program GERTAK dengan selalu memegang teguh prinsip yang ada. Selain itu juga diperkuat dengan dibentuknya petugas layanan Posko GERTAK serta Pasukan Pink guna memastikan program bantuan kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Kemudian dengan pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Trenggalek dapat diketahui ancaman berupa masih banyaknya masyarakat Kabupaten Trenggalek yang

mengaku miskin dan awam terhadap teknologi serta jaringan internet yang kurang memadai karena kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek. Kemudian, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Program GERTAK memiliki peluang yaitu program tersebut dapat dijadikan sebagai program percontohan baik lokal maupun nasional yang dapat diterapkan oleh daerah lain, kemudian peluang tersebut juga diperkuat dengan diterimanya beberapa penghargaan terkait inovasi penanggulangan kemiskinan melalui program GERTAK. Kemudian juga didukung dengan antusias kelompok sasaran dan masyarakat Kabupaten Trenggalek dan didukung dengan adanya kerjasama dengan komunitas lokal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD),Forum CSR yang ada di Kabupaten Trenggalek Sehingga untuk kedepannya Program GERTAK dapat lebih optimal dan lebih baik lagi.

Terkait perumusan strategi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek juga melakukannya secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa strategi dan alternatif yang sangat berguna untuk menyempurnakan program GERTAK. Adapun strategi program GERTAK meliputi, Golden strandart klasifikasi, mekanisme mutasi, sistem rujukan terpadu, bina ekonomi rakyat, serta evaluasi dan redifinisi. Dimana pada tahun ini TKPKD Kabupaten Trenggalek juga akan menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mensinergikan Posko GERTAK dengan Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Selanjutnya untuk implementasi Program GERTAK itu sendiri sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada beberapa kendala yang dialami. Pelaksanaan program sudah sesuai dengan apa yang ada di Rancangan Peraturan Bupati

(Raperbup) terkait PTO atau Standart Oprasional Prosedur (SOP) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian didukung dengan tersedianya anggaran dari APBD dan kerjasama dari Baznas, Forum CSR, dan beberapa OPD terkait. Sedangkan untuk kendala yakni kurangnya keterlibatan kelompok sasaran yakni masyarakat miskin dan monitoring dari TKPKD Kabupaten Trenggalek dalam proses musdes/muskel GERTAK, Kurangnya anggaran dan sarana prasarana, serta awamnya masyarakat kabupaten Trenggalek terhadap teknologi informasi.

Kemudian indikator yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Dengan adanya proses evaluasi maka dapat diidentifikasi masalah atau kendala apa yang muncul dan dapat segera ditemukan penyelesaiannya. Proses evaluasi terkait Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) ini dilakukan oleh Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek secara rutin minimal delapan kali dalam satu tahun. Proses evaluasi tersebut yang dilakukan oleh Kepala TKPKD, beberapa OPD yang terkait, dan Staf yang bertugas dalam program GERTAK tanpa melibatkan kelompok sasaran yang dalam hal ini yaitu masyarakat miskin.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terhadap proses manajemen strategi Program GERTAK dalam menanggulangi permasalahan di Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yaitu sebagai berikut :

1. Agar implementasi program pengentasan kemiskinan berlangsung efektif hendaknya memperhatikan unsur-unsur:

(a) Komunikasi dalam rangka memperjelas tentang program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat untuk menghindari kesa-lahpahaman warga terhadap progam dan pemanfaatan sumberdaya,

(b) Disposisi dengan harapan akan muncul kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan program,

(c) Struktur birokrasi untuk mengetahui proses dan prosedur pertanggungjawaban setiap program,

(d) Standar dan sasaran kebijakan dalam rangka tepat sasaran pada setiap program sehingga benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin, dan

(e) Kondisi sosial politik untuk memperhatikan keadilan dan kesesuaian program.

2. Dalam penerapan model implementasi program pengentasan kemiskinan selain memperhatikan pada unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi hendaknya juga memperhatikan serta menumbuh kembangkan unsur partisipasi dan nilai-nilai kewirausahaan (*entrepreneurship*)
3. Dalam melaksanakan program pengen-tasan kemiskinan hendaknya juga mem-perhatikan potensi lokal, baik dari sum-berdaya manusia, sumberdaya alam mau-pun kondisi demografis dan geografisnya dan juga selalu memperhatikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memi-liki, baik dari sisi programnya maupun hasil dari program tersebut sehingga ke depan akan terus dipelihara dan dilestari-kan keberadaannya.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Desa sebagai satuan kerja terkecil perlu melibatkan kelompok sasaran yakni masyarakat miskin dalam proses musdes/muskel GERTAK.

5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek perlu senantiasa memantau berjalannya musdes/muskel GERTAK agar tujuan dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dapat tercapai.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu menambah fasilitas seperti PC, rak, sepeda motor dan printer berwarna. Sehingga dengan bertambahnya fasilitas yang adapelaksaan program GERTAK lebih efektif dan efisien.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek perlu segera mematangkan sinergi Program GERTAK dengan Program SLRT, dengan demikian diharapkan mampu menunjang fasilitas dan anggaran yang diperlukan dalam implemantasi program GERTAK. Sehingga program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat lebih mensosialisasikan Program GERTAK dan melakukan pelatihan kepada pemerintah desa sebagai satuan kerja tekecil terkait GERTAK Online dan aplikasi GERTAK Apps agar data kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek lebih valid dan update.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
2. Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Trenggalek 2010-2018. Download. trenggalek.bps.go.id (diakses tanggal 25 Maret 2017).
3. Chalid, P. 2006. Teori dan isu pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
4. Haughton, J., dan Khandker, S. R. 2009. Handbook on Poverty and Inequality. Washington, DC: The World Bank. http://doi.org/10.1596/978-0- 8213-7613-3
5. Medah, M. S. 2013. Analisis Beberapa Faktor Penyebab Kemiskinan. *PARTNER*, *20*(2), 144-153.
6. Munkner, Hans H dan Thomas W, 2001. Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin, dalam Menggempur Akar-Akar Kemiskinan (Izzedin Bakhit dkk), Attacking the Roots of Poverty, Jakarta: Yakoma-PGI.
7. Pabudu. 2005. Metode Penelitian Geografi. Jakarta: Bumi Aksara.
8. Supriatna, Tjahya. 1998. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press.
9. Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1987. Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT. *Pustaka LP3ES Indonesia*.
10. Subianto, I. 2008. Analisis faktor-faktor yang memperngaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten sidoarjo, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
11. Suharto dkk . 2004 Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi kasus keluarga miskin di Indonesia, lembaga Studi Pembangunan (LPS) STKS, Bandung, Indonesia.
12. Suharto, E. 2002. "Coping Strategies dan Keberfungsian Sosial: Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan." *Makalah*

pada Seminar "Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pesswrembangunan Kesejahteraan Sosial yang Bernuansa Pekerjaan Sosial" Selasa. Vol. 17.

13. Suharto, E. 1998. *Human Development Strategy: The Quest for Paradigmatic and Pragmatic Intervention for the Urban Informal Sector* (No. 98/2). working paper.
14. Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2015. Peta Indikator Kemiskinan.
15. Willis, K. 2011. *Theories and practices of development*. Taylor & Francis.
16. Word Bank. 2006. Era baru dalam pengentasn kemiskinan di Indonesia. Jakarta.

Lampiran 1.

Foto Kegiatan Penandatanganan MoU
Bupati Trenggalek dengan Rektor Universitas Dr Soetomo

Lampiran 2.

Foto Kegiatan Kuliah Umum
Bupati Trenggalek di hadapan Mahasiswa FEB Universitas Dr Soetomo

Bupati Trenggalek Pamer Desa Wisata di Unitomo

Surabaya, Bhirawa

Pemkab Trenggalek terus mengeksplotasi potensi alamnya dengan mengembangkan desa wisata. Bahkan Plt Bupati Trenggalek Nur Arifin sempat mempromosikan program tersebut dihadapan dosen dan mahasiswa Universitas Dr Soetomo Surabaya.

Pemaparan desa wisatan itu disampaikan oleh Plt Bupati Trenggalek Nur Arifin saat ia diundang menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional dan Lomba Karya Tulis Populer Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi & Bisinis Unitomo "Mendongkrak Sektor Pariwisata Daerah", Senin (15/4). Selain Nur Arifin, narasumber lainnya adalah Revinda Carina dan Rizka Dara Nabila.

Menurut Nur Arifin, saat ini masyarakat tengah mencari tempat wisata yang sifatnya kembali ke alam. Wisatan mencari kawasan yang menyajikan nuansa alam pedesaan. Melihat peluang itulah, Nur Arifin terus berupaya mengembangkan desa wisata lengkap dengan komoditi yang ada. Seperti kawasan pariwisata Hutan Durian yang tersebar di beberapa desa wilayah Kecamatan Watulimo, Putri Maron dan beberapa tempat lainya.

"Ada beberapa air terjun di sana, selain juga wisata susur sungai. Jadi wisatawan punya banyak pilihan. Bagi mereka yang hobi panjat tebing di Trenggalek juga ada," kata pria yang akrab disapa Gus Ipin itu.

Pada kesempatan itu ia juga meminta kepada para mahasiswa untuk membuka lapangan kerja dengan cara kembali ke desa. "Jangan jadi pekerja, tapi buka lapangan kerja dengan membangun desa," katanya. Pada kesempatan itu, Gus Ipin juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Unitomo.

"Saya berharap pihak pihak Kampus Unitomo bisa mengirimkan mahasiswanya untuk KKN ke Trenggalek," katanya. Sementara itu Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq, SH, MH usai menandatangani MoU mengatakan, kerjasama ini sebagai wujud dari kepedulian Pemkab Trenggalek terhadap dunia pendidkan. "Saya berharap kerjasama ini bisa terus terjalin antara Pemkab Trenggalek dengan Unitomo," katanya. ... wwn

Plt Bupati Trenggalek Nur Arifin dan Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq, SH, MH menunjukkan Mou yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

Lampiran 3.

Foto Kegiatan Pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS)
BAPPEDALITBANG Trenggalek dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unitomo

Lampiran 4.

Foto Kegiatan Pelaksanaan Presentasi Laporan Akhir

Lampiran 5.

In Depth Interview dengan Bupati Trenggalek dan Tim Posko GERTAK

KAJIAN ILMIAH IMPLEMENTASI PROGRAM GERTAK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bappeda.ntbprov.go.id Internet Source	20%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 20%
Exclude bibliography	Off		